

Volume 28, Nomor 1, April - Juni 2015
Akreditasi LIPI Nomor: 565/Akred/P2MI-LIPI/04/2014

ISSN: 0215 - 7829

PENAMAS

JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA JAKARTA
2015

DARI MEJA REDAKSI

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa—Allah Swt., Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) Volume 28, Nomor 1, April-Juni 2015 ini dapat diterbitkan dan hadir di hadapan pembaca. Sebagai bagian dari peningkatan kualitas jurnal ilmiah, dari waktu ke waktu kami terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas terbitan dan cetakan untuk mendukung kualitas karya ilmiah itu sendiri. Hal ini tiada lain, agar ilmu pengetahuan yang kami produksi dapat lebih bermanfaat, terutama bagi kebijakan pembangunan bidang agama, dan masyarakat pada umumnya.

Jurnal PENAMAS edisi kali ini menyajikan sebanyak 10 artikel, yang kesemuanya terkait dengan kehidupan keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan, serta lektur dan khazanah keagamaan. Ketiga bidang penelitian atau kajian ini tetap menjadi fokus Jurnal PENAMAS, karena sesuai dengan Tugas dan Fungsi (TUSI) kami sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Agama.

Segenap Dewan Redaksi Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) mengucapkan terima kasih kepada para Mitra Bestari Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan), terutama mereka yang memberikan koreksi dan saran perbaikan (*review*) untuk artikel-artikel Volume 28, Nomor 1, April-Juni 2015 ini, yakni: Prof. DR. Bambang Pranowo (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Prof. DR. Achmad Fedyani Syaifuddin (Universitas Indonesia Depok), Prof. DR. M. Hisyam (LIPI), dan Prof. DR. Ahmad Tafsir (UIN Sunan Gunung Djati Bandung). Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Alfida, MLIS yang secara khusus menerjemahkan abstrak-abstrak artikel pada nomor kali ini ke dalam bahasa Inggris.

Akhirnya, kami berharap artikel-artikel yang disajikan pada edisi kali ini dapat memberikan kontribusi, baik sebagai bahan/dasar pertimbangan kebijakan di bidang pembangunan agama maupun pengembangan ilmu pengetahuan agama dan masyarakat secara umum.

Selamat membaca!

Jakarta, April 2015
Dewan Redaksi

PENAMAS

JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN

Volume 28, Nomor 1, April - Juni 2015
Halaman 25 - 42

DAFTAR ISI

MEMBACA EKSISTENSI 'PUSAT LITERASI' DARI PELOSOK NEGERI: IRONI PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN MADRASAH ALIYAH KONAWA SELATAN	
Abu Muslim	25 - 42

**MEMBACA EKSISTENSI 'PUSAT LITERASI' DARI PELOSOK NEGERI:
IRONI PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN MADRASAH ALIYAH
KONAWA SELATAN**

**READING THE EXISTENCE OF A REMOTE LITERACY CENTER: AN IRONY
OF LIBRARY MANAGEMENT IN MADRASAH ALIYAH (ISLAMIC SENIOR
HIGH SCHOOLS) SOUTH KONAWA**

ABU MUSLIM

Abu Muslim

Balai Penelitian dan
Pengembangan Agama
Makassar
Jl. A.P. Pettarani No. 72
Makassar
email: aL_0365@rocketmail.
com/081343755509
Naskah Diterima
Tanggal 5 Februari 2015.
Revisi 25 Maret-20 April 2015.
Disetujui 27 April 2015.

Abstract

This study invites us to see the real condition of libraries in South Konawe. Using the qualitative descriptive research methods, this study aims to know library management in Islamic Senior High School education level. The research targets were purposively selected for three private or public Islamic Senior High Schools, which represent levels of accreditation. They are MAN Konda (accreditation B), MA Al-Amin Mataiwoi (accreditation C), MA DDI Nurul Qalby Ranomeeto (has not accredited yet). The results showed that the conditions of library management in three Madrasah Aliyah are very limited and not professional. They are limited in terms of infrastructure and books collection. Also, they are not professional regarding to the implementation of library services, since there no guidelines or specific system running the libraries. The role of stakeholders in the library development needs to be improved on intensification of technical assistance and coordination aspects based on madrasa needs. This study also found that in Madrasah Aliyah level, library development is not a priority, since other madrasah infrastructure remains inadequate.

Keywords: Management, Library, South Konawe, MA, Irony

Abstrak

Penelitian ini mengajak kita melihat kondisi riil perpustakaan di Konawe Selatan dengan mengoperasionalkan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk memperoleh gambaran pengelolaan perpustakaan di tingkat satuan pendidikan Madrasah Aliyah. Sasaran penelitian dipilih secara *purposive* 3 Madrasah Aliyah negeri/swasta, yang masing-masing mewakili tingkatan akreditasi, yakni: MAN Konda (akreditasi B), MA Al-Amin Mataiwoi (akreditasi C), dan MA DDI Nurul Qalby Ranomeeto (tidak/belum terakreditasi). Hasil penelitian menunjukkan, bahwa kondisi pengelolaan perpustakaan Madrasah Aliyah di ketiga madrasah sasaran dikelola dengan serba terbatas dan serba otodidak. Terbatas dari segi sarana prasarana dan koleksi buku serta otodidak dari segi pelaksanaan pelayanan yang semuanya dilakukan tanpa pedoman dan/atau sistem khusus yang dipegangi. Peran *stakeholder* dalam pengembangan perpustakaan dinilai masih perlu peningkatan dari aspek intensifikasi bantuan teknis serta aspek koordinasi berbasis kebutuhan madrasah. Penelitian ini juga menemukan, bahwa sesungguhnya di tingkat satuan pendidikan Madrasah Aliyah, pengembangan perpustakaan bukan menjadi prioritas utama, sebab sarana prasarana madrasah lainnya pada kenyataannya juga masih belum memadai.

Kata Kunci: Pengelolaan, Perpustakaan, Konawe Selatan, MA, ironi

PENDAHULUAN

Mari kita lihat keberadaan perpustakaan di Indonesia. Di sekolah-sekolah, keberadaan perpustakaan 'hanyalah' sebagai hiasan belaka. Pengunjung perpustakaan yang haus akan ilmu di negara kita tercinta ini hanya dapat dihitung dengan jari. Sisanya? Minat baca orang Indonesia masih terbilang rendah. Data dari United Nations Development Programme (UNDP) misalnya, menyebutkan dalam hal minat baca, Indonesia menempati peringkat 96, sejajar dengan Bahrain, Malta, dan Suriname. Bahkan untuk kawasan Asia Tenggara, hanya ada dua negara di bawah peringkat Indonesia, yakni Kamboja dan Laos. Data ini diperkuat oleh survei yang dikeluarkan oleh UNESCO yang menunjukkan, bahwa minat baca masyarakat paling rendah di ASEAN adalah Indonesia. Rendahnya minat baca ini dibuktikan dengan indeks membaca masyarakat Indonesia yang baru sekitar 0,001. Artinya, dari 1000 penduduk, hanya ada 1 orang yang masih memiliki minat baca tinggi (1:1000). Angka ini masih sangat jauh dibandingkan dengan angka minat baca di Singapura yang memiliki indeks membaca sampai 0,45 (UNESCO, 2011).

Belum adanya minat yang besar dalam menjelajah dunia ilmu dan kurangnya kesadaran akan pentingnya membaca bagi perkembangan diri adalah persoalan genting yang harus diantisipasi bersama. Dalam benak mereka (para siswa), perpustakaan hanyalah tempat bertumpu bagi si kutu buku yang biasanya sulit bersosialisasi. Pendapat inilah yang menjadi faktor lain yang menimbulkan pagar pembatas yang tinggi antara generasi penerus dan pentingnya perpustakaan sebagai sumber penjelajahan ilmu. Perpustakaan madrasah

sebagai salah satu jenis perpustakaan yang berkaitan erat dengan kegiatan pendidikan formal di madrasah, seharusnya mempunyai peran yang sangat efektif dan strategis untuk meningkatkan minat baca siswa. Perpustakaan madrasah dewasa ini tidak saja merupakan unit kerja yang menyediakan bacaan guna menambah pengetahuan dan wawasan bagi murid, tapi juga merupakan bagian yang integral dari kegiatan pembelajaran. Artinya, penyelenggaraan perpustakaan madrasah harus sejalan dengan visi dan misi madrasah dengan mengadakan bahan bacaan bermutu yang sesuai kurikulum, menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan bidang studi dan kegiatan penunjang lain (Hanna 2011, 1).

Pada dasarnya, perpustakaan dirancang agar tidak hanya sebagai kumpulan ilmu pengetahuan, tetapi perpustakaan harus dirancang sedemikian rupa agar dapat menjadi sumber pembelajaran secara mandiri bagi penggunanya. Salah satu tugas perpustakaan sekolah/madrasah adalah melayani para peserta didik secara optimal, prinsip yang harus senantiasa dipegang adalah pengguna (pemustaka) merupakan awal dan akhir dari sebuah pelayanan perpustakaan. Adalah sebuah kegagalan jika perpustakaan jauh dari pemustakanya (Suherman 2013, 134). Berfungsinya perpustakaan secara efektif dan efisien akan menunjang mutu pelaksanaan pendidikan. Terdapat beberapa faktor yang saling berkaitan bila peran perpustakaan ingin dicapai secara maksimal. Faktor-faktor yang dimaksud antara lain: koleksi, staf, fasilitas, pendanaan, dan lingkungan yang kondusif terhadap aktifitas pemberdayaan informasi. Meningkatnya kesadaran manajemen dari

lembaga induk perpustakaan terhadap fungsi perpustakaan akan membantu terciptanya motivasi para pengguna perpustakaan dalam menambah wawasan ilmunya serta kompetensinya, sehingga berpeluang untuk memiliki daya saing dalam kehidupan masyarakat global (Abdurahman 2013).

Kumpulan sumber informasi yang terdapat dalam sebuah perpustakaan tidak akan memberikan manfaat yang banyak apabila dalam pengelolaannya tidak dilakukan dengan baik dan profesional. Sistem pengelolaan profesional pun tidak akan berjalan dengan baik tanpa fasilitas yang baik dan memadai pula. Sebaik apapun tenaga perpustakaan, bila tidak diiringi dengan baiknya fasilitas sudah dapat dipastikan kinerja perpustakaan pun tidak maksimal. Sebagai salah satu sarana memperoleh pengetahuan, maka perhatian penuh terkait manajemen pengelolaan perpustakaan terpadu menjadi penting untuk dioptimalkan. Tanpa adanya petugas perpustakaan dengan kemampuan yang baik, perpustakaan akan kurang dilirik walaupun perpustakaan tersebut memiliki fasilitas yang lengkap. Secara umum, perpustakaan mempunyai arti sebagai suatu tempat yang di dalamnya terdapat kegiatan penghimpunan, pengelolaan, dan penyebarluasan (pelayanan) segala macam informasi, baik yang tercetak maupun yang terekam dalam berbagai media, seperti buku, majalah, surat kabar, film, kaset, tape recorder, video, komputer, dan lain-lain (Yusuf 2007, 1).

Untuk itu, dipandang perlu untuk melakukan penelitian yang memfokuskan penelusuran terkait bagaimana kondisi nyata pengelolaan perpustakaan di tingkat

satuan pendidikan Madrasah Aliyah, yang terangkum dalam masalah pokok tentang bagaimana pengelolaan perpustakaan Madrasah Aliyah di Konawe Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran utuh terkait problematika pengelolaan perpustakaan di Madrasah Aliyah di pelosok negeri, untuk selanjutnya dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait apa dan bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah untuk menopang eksistensi Madrasah Aliyah melalui pemberdayaan perpustakaan sebagai jantung institusi. Perpustakaan madrasah yang dimaksud dalam penelitian ini, bukan hanya kumpulan buku yang terdapat dalam suatu ruang untuk dibaca, tetapi merupakan satuan kerja dalam lingkungan madrasah yang memiliki koleksi perpustakaan, ruang perpustakaan, pengelola perpustakaan, dan layanan perpustakaan.

Kerangka Konsep

Perpustakaan madrasah merupakan perpustakaan yang dikelola sepenuhnya oleh madrasah yang bersangkutan, dengan tujuan utama mendukung terlaksananya dan tercapainya tujuan madrasah dan tujuan pendidikan pada umumnya. Madrasah merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, dan teknologi, keterampilan, seni, serta wawasan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Perpustakaan madrasah juga berfungsi sebagai sumber belajar, mengembangkan minat, dan kebiasaan membaca pada diri peserta didik, juga sebagai tempat rekreasi sehat melalui buku-buku bacaan (Utari 2010, 1).

Secara konsepsional, perpustakaan madrasah mengemban visi pendidikan, yakni sebagai sumber belajar mengajar untuk meningkatkan ketakwaan guru, siswa maupun karyawan. Di samping itu, keberadaan perpustakaan madrasah diharapkan mampu menanamkan keimanan kepada peserta didik dengan mengamalkan ajaran Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. (Kholqillah 2010, 1).

Dalam Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menyatakan, bahwa pemerintah berkewajiban menggalakkan promosi gemar membaca dan memanfaatkan perpustakaan. Untuk itu, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi, di mana fungsi perpustakaan adalah sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi yang akan memperluas wawasan, meningkatkan kecerdasan, dan keberdayaan bangsa. Perpustakaan sekolah/madrasah sebagai salah satu jenis perpustakaan yang berkaitan erat dengan kegiatan pendidikan formal di sekolah mempunyai peran yang sangat efektif dan strategis untuk meningkatkan minat baca siswa. Perpustakaan madrasah dewasa ini tidak saja merupakan unit kerja yang menyediakan bacaan guna menambah pengetahuan dan wawasan bagi murid, tapi juga merupakan bagian yang integral dari kegiatan pembelajaran (Murniaty 2006, 7). Artinya, penyelenggaraan perpustakaan madrasah harus sejalan dengan visi dan misi madrasah dengan mengadakan bahan bacaan bermutu yang sesuai kurikulum, menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan bidang

studi, dan kegiatan penunjang lain. Terlebih setelah dikeluarkannya Pedoman Umum Penyelenggaraan Perpustakaan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia melalui Standar Nasional Perpustakaan (SNP) perguruan tinggi, sekolah/madrasah sebagai pedoman teknis sekaligus perpanjangan tangan dari UU tersebut, yang di dalamnya mencakup SNP 007:2011 Perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, SNP 008:2011 Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, SNP 009: 2011 Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, dan SNP 010:2011 Perpustakaan Perguruan Tinggi (PNRI).

Perpustakaan dapat diartikan sebagai kumpulan buku yang terletak pada suatu ruangan (Djamas 2005, 214). Perpustakaan juga adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka [Pasal 1 ayat (1) UU No. 43 Tahun 2007]. Sementara itu, dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menyebutkan, bahwa Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.

Perpustakaan madrasah bukan sekadar tempat penyimpanan bahan pustaka (buku dan non buku) (Bafadal 1996, 2-3). Di tingkat sekolah/madrasah, perpustakaan sudah selayaknya mendapatkan porsi dan posisi

yang strategis guna ikut merealisasikan tujuan pendidikan. Semua pihak, khususnya kepala madrasah harus memberi perhatian lebih akan eksistensi perpustakaan di madrasah, dan tidak lagi dianggap sebagai tempat menyimpan buku bekas, barang-barang tidak terpakai, bahkan tempat bermain saat tidak ada kegiatan belajar mengajar.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengoperasionalkan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk memperoleh gambaran pengelolaan Madrasah Aliyah. Penelitian ini selanjutnya menjadikan Konawe Selatan sebagai lokus penelitian dengan memilih secara *purposive* 3 Madrasah Aliyah negeri/swasta, yang mewakili tingkatan akreditasi B, C, dan tidak/ belum terakreditasi.

Dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi dan wawancara (Cresswell 1994). Penggunaan metode ini diharapkan dapat mengungkap data lebih dalam dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*). Penggunaan satu teknik penelitian tentunya tidak dapat menjamin validitas data. Karena itu, teknik wawancara digunakan berpasangan dengan teknik observasi/pengamatan. Teknik ini digunakan untuk melihat bagaimana perpustakaan madrasah dikelola. Salah satu ciri penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri (Sugiyono 2010, 305). Oleh karena itu, dalam penelitian ini analisis data telah dilakukan sejak penelitian ini berlangsung hingga berakhirnya proses pengumpulan data.

Analisis pertama dilakukan pada tingkat reduksi data dengan model analisis deskriptif. Karena proses analisis dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data, maka kecil kemungkinan terjadinya kekurangan data, karena peneliti akan dengan mudah melihat unsur-unsur analisis yang hilang atau tidak dibicarakan dengan informan pada saat penggunaan metode wawancara dan pengamatan berlangsung. Proses analisis tidak hanya berhenti sampai pada penguraian data mentah dalam bentuk deskripsi, tetapi juga dilakukan telaah kritis terhadap data yang dihimpun dengan mendiskusikan dan meneropongnya dari sejumlah pemikiran teoritis berkenaan dengan fenomena pengelolaan perpustakaan secara umum. Persisnya, analisis dikembangkan dari data yang dikumpulkan selama penelitian, dianalisis pada tingkat reduksi data, disajikan dan dijelaskan secara deskripsi. Artinya, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Miles dan Huberman 1984).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebaran Madrasah Aliyah di Konawe Selatan

Kabupaten Konawe Selatan merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak di Andoolo. Kabupaten ini berasal dari hasil pemekaran Kabupaten Kendari yang disahkan dengan UU Nomor 4 Tahun 2003, tanggal 25 Februari 2003. Sejak berdiri, Kabupaten Konawe Selatan telah mengalami pemekaran dari 11 kecamatan menjadi

22 kecamatan, dengan 350 desa dan 15 kelurahan. Jumlah tersebut sudah termasuk desa persiapan yang jumlahnya mencapai 14 desa (BPS Konawe Selatan 2013, 8). Dari 22 kecamatan itu, Madrasah Aliyah tersebar hanya di 13 kecamatan. Dengan demikian, masih terdapat 9 Kecamatan di Konawe Selatan yang belum menyelenggarakan pendidikan Madrasah Aliyah. Hal ini menjadi catatan penting dalam penelitian ini, dalam rangka pemerataan akses pendidikan Madrasah Aliyah di seluruh kecamatan se-Konawe Selatan dalam usaha menopang pertumbuhan angka partisipasi sekolah, di mana capaian di bidang pendidikan terkait erat dengan fasilitas pendidikan. Hal ini juga sekaligus menjadi salah satu solusi mengatasi penurunan yang sangat signifikan pada angka partisipasi murni (APM) pendidikan Konawe Selatan di tingkat sekolah menengah lanjutan tingkat atas yang pada tahun 2010 mencapai 52,69%, 2011 turun jadi 49,5%, dan tahun 2012 turun lagi menjadi 42,62% (BPS Konawe Selatan 2013, 13-4).

Dari enambelas Madrasah Aliyah yang ada di Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya dipilih 3 Madrasah Aliyah sebagai sasaran penelitian, dengan mempertimbangkan keterwakilan MA berdasarkan tingkat akreditasinya yang dalam klasifikasi sebagaimana tabel di atas, hanya terbagi atas 3 tingkatan akreditasi, yakni: B, C, dan tidak/belum terakreditasi, sementara belum ada yang memenuhi penilaian untuk memperoleh Akreditasi A. Selanjutnya, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan konteks keterwakilan MA berdasarkan hasil *prefield research* serta keterjangkauan sasaran penelitian, kemudian dipilih secara *purposive* 3 MA sebagai sasaran penelitian

yakni: Madrasah Aliyah Negeri Konda mewakili tingkat akreditasi B, Madrasah Aliyah Al-Amin Mataiwoi Kecamatan Angata di tingkat akreditasi C, dan Madrasah Aliyah DDI Nurul Qalby Ranomeeto sebagai perwakilan Madrasah Aliyah yang tidak/belum terakreditasi.

Eksistensi Perpustakaan Madrasah Aliyah: Bertahan di Kesederhanaan

"Beginilah Pak kondisinya perpustakaan kami, terpaksa kita satukan saja antara ruang guru, tempat baca dan sedikit ruang bersekat untuk sekadar *privacy* kepala sekolah. Itu semua kami lakukan untuk memanfaatkan ruang sekolah kita yang bapak bisa lihat sendiri sangat terbatas begini. Kita *lihatmi* juga rak dan meja baca yang kayaknya tidak begitu representatif untuk disebut sebagai perpustakaan, tapi semangat kami untuk menyelenggarakan perpustakaan meski dengan sangat sederhana tidak surut pak, karena guru, murid, dan perangkat sekolah lainnya sangat membantu dalam menghidupkan perpustakaan kami ini" (Ibu Husni, S.Ag, Kepala Madrasah MA Al-Amin Mataiwoi Angata 25 Maret 2014).

Sebuah keterangan datar dari Ibu Husni, Kepala Madrasah Aliyah Al-Amin Mataiwoi ketika memperkenalkan perpustakaannya kepada peneliti, menggambarkan betapa mirisnya kondisi gudang pengetahuan Madrasah Aliyah yang kepadanya dibebankan ekspektasi sangat besar dalam membantu pengembangan kelimuan di Madrasah Aliyah. "kalau mau mengukur keberhasilan pendidikan agama di negara ini, lihatlah perpustakaan sekolahnya", begitulah kira-kira anekdot yang marak digaungkan ketika membincang tentang perhatian terhadap

perpustakaan. Dari keterangan tersebut, di dalamnya juga menyiratkan semangat besar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis perpustakaan, meski dengan dukungan sarana dan prasarana yang sangat terbatas.

Kondisi di atas tidak jauh berbeda dengan keadaan perpustakaan di Madrasah Aliyah DDI Nurul Qalby Ranomeeto. Perpustakaan yang ditunjukkan adalah "hanya" sebuah rak buku besar beserta sebuah lemari dua pintu dengan deretan buku-buku yang bercampur sedemikian rupa agar bisa memenuhi tempat yang serba terbatas, belum lagi faktor ruang yang juga sangat terbatas. Madrasah yang juga menyelenggarakan jenjang pendidikan Tsanawiyah ini menggunakan "hanya" satu ruangan yang berfungsi ganda. Di dalam satu ruangan itulah perpustakaan ditempatkan bersamaan dengan ruang baca, ruang guru, ruang komputer, ruang praktikum muatan lokal, dan ruang kepala sekolah yang diatur sedemikian rupa dengan diberi sekat-sekat tripleks untuk memisahkan fungsi ruang satu sama lain. "Saya kurang tahu pak, apakah yang bapak lihat di sini bisa dikategorikan sebagai perpustakaan atau tidak, tapi beginilah keadaan sesungguhnya di madrasah kami, yang kami punya hanya satu rak saja ditambah dengan lemari besar berpintu dua, dan itu sudah cukup untuk menampung buku-buku kami yang bisa dikatakan masih sangat terbatas juga. Tapi yang jelas, bahwa perangkat dan penyelenggaraan perpustakaan semua kami lakukan di ruangan ini. Pengelolanya ada, sirkulasinya berjalan, buku besar koleksi buku kami juga tersedia meski semuanya dengan kondisi yang serba terbatas, namun *Alhamdulillah* para siswa dan guru-guru kami tetap bisa memanfaatkan buku-buku

yang ada. Terpaksa juga kami satukan ruangan perpustakaan dengan ruang guru, bahkan dengan ruangan KS (Kepala sekolah, ed.), serta ruangan untuk muatan lokal dan lab komputer karena gedung madrasah kami yang serba terbatas. Penyatuan ruangan itu sesungguhnya memberi efek positif kebersamaan dan kekeluargaan antara siswa dan guru sebab semuanya bisa saling berkomunikasi, baik formal maupun non formal di ruangan ini (Pak Subhan, Kepala madrasah DDI Nurul Qalby Ranomeeto, 26 Maret 2014).

Hal yang sedikit lebih baik terlihat pada penyelenggaraan perpustakaan Madrasah Aliyah Negeri Konda, sebab telah memiliki ruangan tersendiri untuk perpustakaan yang terpisah dengan gedung lainnya. Di perpustakaan dengan luas sekitar 9x10 m² itu juga telah memisahkan area khusus untuk ruang koleksi umum, referensi, dan arsip. Hanya saja, saat penelitian ini dilakukan, mereka belum memiliki rak khusus untuk mengatur koleksi buku-buku umum (kecuali satu rak untuk buku referensi, dan satu rak lainnya untuk buku arsip), sehingga penataan buku untuk koleksi umum hanya menggunakan meja yang disusun sedemikian rupa mengelilingi sisi ruangan perpustakaan ditambah dengan satu meja besar persis di tengah-tengah ruangan sebagai meja baca. "seperti inilah perpustakaan kami, meskipun sudah punya ruangan khusus, tetapi kami masih sangat terbatas dalam pengadaan rak buku. Jadi untuk sementara, buku-buku koleksi umum kami letakkan saja di atas meja-meja ini sebagai pengganti rak agar para siswa dan guru bisa dengan mudah mengakses buku-buku yang diperlukan. Jadi kalau berantakan begini, harap maklum saja. Ini semua mungkin karena keterbatasan

pendanaan, sehingga perangkat-perangkat pendukung perpustakaan belum bisa kami adakan. Selain itu, buku-buku yang tersedia masih sangat minim jika dibandingkan dengan jumlah siswa di sini tentunya sangat tidak sesuai (Bidasari Razak, Pengelola Perpustakaan MAN Konda, 24 Maret 2014).

Berdasarkan hasil observasi dan penuturan mereka tentang kondisi ruang perpustakaan di masing-masing madrasah, praktis menunjukkan bahwa eksistensi perpustakaan juga menjadi pelengkap "kesederhanaan" eksistensi Madrasah Aliyah di Konawe Selatan. Meski begitu, di tengah terbatasnya sarana dan prasarana madrasah, kesungguhan mereka untuk menyelenggarakan perpustakaan perlu diapresiasi meski dengan keterbatasan dan kesederhanaan yang sama. Ruang terbatas (kecuali MAN Konda yang memiliki ruang khusus, namun belum punya rak buku) yang terintegrasi dengan peruntukan ruang lainnya di dua MA, yakni MA DDI Nurul Qalby Ranomeeto (perpustakaannya terintegrasi dengan ruang guru, ruang komputer, ruang untuk praktikum ruang keterampilan, ruang baca, ruang pelayanan, serta sekat khusus untuk bilik kepala sekolah) dan MA Al-Amin Mataiwoi (perpustakaannya terintegrasi dengan ruang tamu, ruang baca, ruang guru, ruang pelayanan, dan bilik khusus bersekat triplek untuk pemisah ruang kepala sekolah) mencerminkan betapa keberadaan perpustakaan di Madrasah Aliyah bisa disebut antara ada dan tiada dengan perangkat dan ruang, serta buku-buku yang serba terbatas serta sistem layanan yang boleh dikata jauh dari standar, bahkan mereka pun kadang miris ketika hendak menyebut seperangkat buku, rak, ruang, dan sistem layanan yang demikian itu sebagai perpustakaan.

Ironis memang, ketika melihat kondisi umum tiga perpustakaan yang dijadikan sebagai sasaran penelitian yang penyelenggaraannya dilakukan dengan pengelolaan yang serba sederhana. Sederhana dalam hal sarana dan prasarana, sederhana dalam hal koleksi, sederhana dalam hal pelayanan, serta terbatas dalam penganggaran. Hal ini semakin diperparah dengan minimnya sumber daya pengelola perpustakaan. Dari 3 Madrasah Aliyah yang dijadikan sebagai sasaran penelitian, ketiganya hanya menempatkan secara eksplisit satu orang tenaga perpustakaan yang sekaligus sebagai penanggung jawab harian penyelenggaraan perpustakaan. Di antara para petugas perpustakaan hanya satu yang bertatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, yakni di MAN Konda, selebihnya masih berstatus honorer. "di sini sebenarnya kami menunjuk secara resmi ibu wakil kepala madrasah sebagai penanggung jawab harian perpustakaan. Hal ini karena kami juga masih kekurangan guru dan staf lainnya, sehingga dalam pengelolaan perpustakaan terpaksa dibebankan kepada wakamad. Akan tetapi pelaksanaannya di lapangan sebenarnya tergantung situasi dan kondisi. Jadi memang betul, wakamad adalah sekaligus penanggung jawab perpustakaan secara penuh terkait pengelolaan harian, akan tetapi hal itu disesuaikan dengan jam kerja yang bersangkutan, karena di sini kami menggunakan sistem "jaga bergiliran". Artinya, setiap guru memiliki hari kerja yang berbeda satu sama lain, sebab di antara mereka juga masih harus mencukupkan jam pelajarannya di sekolah lain, sehingga tidak setiap hari mereka bisa datang ke sekolah termasuk wakamad. Untuk mengisi secara teknis pengelolaan

perpustakaan di mana wakamad tidak sedang bertugas, maka pelaksana pengelola perpustakaan diserahkan kepada guru piket. Hal ini dilakukan agar bisa memaksimalkan perpustakaan setiap harinya (Tuti Mariani, MA Al Amin Mataiwoi 28 Maret 2014).

Bagaimana dengan koleksi buku-buku yang dimiliki? Sudahkah masing-masing madrasah memenuhi kriteria yang menyebutkan, bahwa jumlah koleksi pada setiap perpustakaan sekolah/madrasah paling sedikit sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan. Sementara dalam Pasal 43 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan, bahwa standar jumlah Buku Teks Pelajaran di perpustakaan dinyatakan dalam rasio minimal jumlah Buku Teks Pelajaran untuk masing-masing mata pelajaran di perpustakaan satuan pendidikan untuk setiap Peserta Didik. Hal ini menghendaki, bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan buku pelajaran wajib bagi setiap siswa dibutuhkan masing-masing satu buku per siswa untuk setiap mata pelajaran. Namun ketentuan ini jika dihadapkan dengan kenyataan di lapangan mengisyaratkan sebuah capaian yang "jauh panggang dari api", "jangan satu buku pelajaran per siswa pak, mengadakan dua atau tiga buku untuk setiap mata pelajaran saja itu kami harus bersusah payah mewujudkannya, menyiasati dana Bantuan Operasional Siswa menjadi salah satu senjata ampuh untuk mewujudkan kehadiran buku-buku penting itu untuk semua mata pelajaran. Hal lain adalah penyesuaian-penyesuaian tetap kami lakukan terkait bagaimana cara

menghadirkan buku-buku wajib sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan. Salah satu yang cukup membantu kami adalah kesediaan para guru untuk membeli dan mencari bukunya sendiri sebagai bahan mereka mengajar yang bisa difotokopi oleh para siswa jika memang dibutuhkan" (Subhan, Kepala Madrasah Nurul Qalby Ranomeeto).

Latar belakang pendidikan para pengelola perpustakaan juga merupakan potret "kesederhanaan" lainnya yang menjadi sorotan dalam temuan penelitian ini. Sebab tidak satu pun di antara mereka yang berlatar belakang pendidikan ilmu perpustakaan. Dua di antaranya adalah Sarjana Agama jurusan Pendidikan Agama Islam, sementara pengelola di MAN Konda berlatar belakang pendidikan biologi. Sangat ironi memang, sebab mungkin saja di Konawe Selatan sangat sulit menemukan sarjana ilmu perpustakaan. Kalau pun ada mungkin hanya satu, dua orang saja, dan di antara mereka yang sarjana perpustakaan itu (kalau ada), kelihatannya tidak memprioritaskan pilihan pengabdian ke Madrasah Aliyah, sebab sudah menjadi rahasia umum, bahwa bekerja sebagai staf di Madrasah Aliyah (terlebih yang berada di pelosok) sangatlah tidak menjanjikan, di samping karena gajinya kecil, dukungan sarana dan prasarannya juga tidak mendukung, sehingga meskipun seorang yang memiliki pengetahuan maksimal di bidang perpustakaan akan kesulitan memaksimalkan kinerjanya di tengah kondisi madrasah yang serba terbatas. "Seingat saya, dari pembacaan pegawai, serta selama saya melakukan *input* data pegawai di sini, tidak pernah atau belum pernah ada pengangkatan pegawai di Kementerian

Agama Konawe Selatan, baik itu PNS maupun honorer yang berlatar belakang pendidikan jurusan ilmu perpustakaan atau sejenisnya. Kebanyakan memang adalah sarjana agama dan lulusan-lepasan Fakultas Tarbiyah dari perguruan tinggi keagamaan Islam lainnya. (Ahmad Amsul, staf Kepegawaian Kemenag Konawe Selatan, tanggal 9 Maret 2014).

Hal ini tentu saja menjadi "data penting" bagi setiap perguruan tinggi yang menyelenggarakan jurusan perpustakaan, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur, namun sekaligus menjadi "cambuk" bagi mereka dalam hal pemenuhan lapangan kerja bagi para alumninya. Di satu sisi, alumni jurusan perpustakaan adalah sebuah 'kebutuhan besar' bagi penyelenggaraan pendidikan di KTl. Sementara di sisi lain, "mengajak" mereka (para alumni jurusan perpustakaan) agar bersedia mengabdikan dirinya di Madrasah Aliyah (terlebih di pelosok) adalah bukan pekerjaan mudah, karena kesungguhan dan maksimalisasi kinerja sangat berhubungan erat dengan tingkat kesejahteraan mereka yang sudah sama kita ketahui tidak/belum bisa dipenuhi oleh penyelenggara pendidikan Madrasah Aliyah di pelosok-pelosok sebagaimana di Konawe Selatan.

Mengelola Perpustakaan MA di Konsel: Serba Otodidak Bermodal "Semangat"

Library is an important intellectual resource of the academic community. It helps to an academic institution members for their 'self development' library is the heart of the institutions (Hosain Khan Tth, 2). Perpustakaan adalah sumber daya intelektual penting dari komunitas akademik, yang diharapkan

dapat membantu para pemustaka dalam rangka 'pengembangan diri'. Itulah sebabnya perpustakaan seringkali disebut-sebut sebagai "jantungnya sebuah institusi". Idealnya, sebuah perangkat pengelolaan perpustakaan melaksanakan fungsinya secara serius dan terfokus, pelibatan secara penuh semua unsur dalam perangkat perpustakaan mulai dari pemerintah, penanggung jawab satuan pendidikan (Kepala Madrasah), dan petugas pengelola perpustakaan menjadi penting dalam rangka mendukung program pelaksanaan pendidikan di madrasah/sekolah. Hal ini secara tegas termuat dalam School Library Guidelines oleh IFLA/UNESCO tahun 2002. Manifesto tersebut menyatakan, bahwa setiap pemerintah melalui kementerian yang bertanggung jawab atas bidang pendidikan harus mengembangkan strategi, kebijakan, dan perencanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip-prinsip manifesto ini. Disebutkan, bahwa misi perpustakaan sekolah dinyatakan sebagai berikut: *The school library equips students with lifelong learning skills and develops their imagination, thereby enabling them to live as responsible citizens*. Bahwa perpustakaan sekolah berperan memperlengkapi para siswa dengan keterampilan pembelajaran seumur hidup dan juga mengembangkan imajinasi mereka, sehingga mereka nantinya akan menjadi warga negara yang bertanggung jawab (Unesco/IFLA 2002, 3). Bahkan secara tegas dalam Pasal 23 ayat (1) UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menyebutkan, bahwa Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.

Bagaimana dengan tenaga-tenaga perpustakaan di Madrasah Aliyah Konawe Selatan mengelola perpustakaan? Sudahkah perangkat pengelolaannya mendapatkan dukungan penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan pelayanan maksimal kepada para pemustaka? Sudahkah mereka bekerja sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Standar Nasional Perpustakaan? Sudahkah perpustakaan diarahkan sebagai *the heart of the institutions*?

Berkaca dari eksistensi perpustakaan yang sudah terlanjur sederhana, maka sistem pengelolaannya pun seolah berbanding lurus dengan kediriannya. Hal ini dapat dilihat dari "ketidakjelasan" tujuan, program kerja tahunan, serta visi dan misi perpustakaan yang semuanya tidak/belum dirumuskan secara tertulis. Oleh karena itu, mencocokkan tujuan perpustakaan dengan tujuan madrasah menjadi *disconnected* sebab sulit menyesuaikan alat ukurnya secara spesifik. "Kami sesungguhnya melaksanakan perpustakaan ini secara otodidak, selain karena latar belakang pendidikan kami bukan ilmu perpustakaan, dukungan pelatihan, ataupun seminar apalagi diklat terkait perpustakaan belum pernah ada yang kami ikuti. Jangankan mengikuti, mendengar program yang berkaitan saja kami tidak pernah. Jadi semuanya kami laksanakan berdasarkan pengalaman yang kami lihat di sekolah-sekolah kami sebelumnya serta di perpustakaan kampus kami dulu. Itu pun dengan cara-cara yang serba otodidak. Asal sistem pelayanan, pencatatan, dan sirkulasinya dapat kami kontrol. Menurut kami, itu sudah cukup sebagai dasar-dasar kami mengelola perpustakaan ini. Jadi kalau ditanya tentang tujuan, visi, misi, atau

program kerja perpustakaan secara tertulis, maka itu belum pernah terpikirkan bagi kami untuk diadakan. Selama ini juga kami melanjutkan pengelolaan dan pendataan buku serta sistem pinjam meminjam melalui kartu perpustakaan untuk guru dan siswa yang sederhana dari pengelola sebelumnya (Bidasari Razak, Petugas Perpustakaan MAN Konda).

Fenomena pengelolaan otodidak seperti ini sesungguhnya merupakan usaha praktis yang dilakukan oleh para petugas perpustakaan madrasah di pelosok-pelosok tanah air. Hampir semuanya tidak/belum pernah mengikuti semacam diklat, pelatihan, seminar, dan/atau lokakarya tentang perpustakaan. Pengalaman sebagai pemustaka di sekolah-sekolah negeri dan/atau di perguruan tinggi adalah modal berharga bagi mereka mengelola perpustakaan. Setidaknya, jika mereka pernah memegang kartu anggota perpustakaan, pernah meminjam buku, pernah mengisi buku kunjungan, bisa mencari buku berdasarkan kategori keilmuan, pernah membaca tata tertib perpustakaan, serta pengalaman-pengalaman lainnya sebagai pengguna perpustakaan, maka hal tersebut bisa memberinya inspirasi untuk selanjutnya ditiru sistemnya sedemikian rupa berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan sarana prasarana yang dimiliki/disiapkan oleh pihak sekolahnya.

Selain itu, karena keterbatasan yang dimiliki, sistem pengelolaan yang terkait dengan *input* data serta pengaturan buku dilakukan secara sederhana tanpa dilengkapi dengan sistem Informasi Teknologi Elektronik. Sebab bagi perpustakaan Madrasah Aliyah di pelosok-pelosok, pengadaan komputer dan layanan internet

menjadi sesuatu yang sangat mewah. "Semuanya serba manual dan atas kreasi sendiri, *input* buku dalam buku besar kami lakukan dengan manual, pendataan sirkulasi pinjam meminjam juga manual alias ditulis tangan. Penomoran buku-buku kami juga manual berdasarkan urutan datangnya buku, meski kami tetap melakukan klasifikasi berdasarkan kategori disiplin keilmuan yang kira-kira disesuaikan sebagaimana mestinya. Jadi kami tidak punya aplikasi pengelolaan perpustakaan yang canggih, sebab komputer pun belum ada" (Tuti Mariani, Petugas Perpustakaan MA Al Amin Mataiwoi).

Kondisi ini juga sangat mempengaruhi pelayanan perpustakaan yang maksimal untuk para pemustaka yang kepada mereka seharusnya diberikan pelayanan yang sebaik-baiknya serta sedapat mungkin memberikan jaminan kenyamanan dan ketentraman batin selama berada di perpustakaan. Ketersediaan buku-buku baru juga menjadi sesuatu yang dapat mengundang mereka ke perpustakaan. Bagi guru, tersedianya buku pegangan untuk bidang studi yang diampunya cukup membantu dalam menyusun silabus pelajaran dan menyampaikan pokok-pokok ajarannya. Sementara bagi para siswa, perpustakaan menjadi pelarian utama untuk membantu mereka menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, bahkan untuk sekadar bersantai mengisi waktu luang jika sedang ada jam pelajaran yang kosong serta selama jam istirahat. "Saya cukup terbantu dengan adanya perpustakaan ini pak, tugasku *bisapi* kita selesaikan dari buku-buku yang ada di sini, selain itu kalau ada waktu luang, membaca di perpustakaan adalah sasaran kami memecah penat, hampir tiap hari kami

masuk perpustakaan. Selain buku pelajaran, novel juga menjadi sasaran baca kami yang bisa menambah inspirasi" (Sri Wijayanti, Siswi kelas X.1 MAN Konda). Akan tetapi tidak semua siswa menyukai perpustakaan sebagai tempat mereka mengisi waktu luang, terlebih bagi mereka yang menginginkan suasana nyaman, sehingga kondisi perpustakaan Madrasah Aliyah yang minim koleksi serta ruang yang terkesan sempit, membuat siswa tidak tertarik menggunakan layanan perpustakaannya.

Sejatinya, semua pengelola perpustakaan menghendaki sebuah sistem tata kelola perpustakaan yang baik dan benar atau sesuai standar nasional yang telah ditetapkan, namun minimnya sosialisasi terkait regulasi dan pedoman-pedoman teknis pengelolaan perpustakaan, khususnya di wilayah-wilayah yang jauh dari kota, seperti di Kecamatan Angata (lokasi MA Al-Amin Mataiwoi) Konawe Selatan membuat mereka para pengelola perpustakaan menjadi sangat buta dengan perkembangan informasi terkait apa saja yang seharusnya disiapkan/diadakan dalam menyelenggarakan perpustakaan, serta bagaimana sesungguhnya mengelola perpustakaan dengan baik dan benar. Selain itu, jika hendak mewujudkan pengelolaan perpustakaan berstandar nasional, maka sudah barang tentu harus berbanding lurus dengan besarnya anggaran yang diperlukan dalam pemenuhannya. Sebut saja misalnya, pembangunan ruang khusus serta sarana yang memadai, pengadaan buku pelajaran, dan buku-buku penunjang lainnya yang disesuaikan dengan jumlah siswa dan harus selalu di *update* secara berkala, perangkat-perangkat pendukung, seperti komputer dan jaringan internet, langganan terbitan berkala, kenyamanan

ruang, sampai kepada penggajian yang sesuai kepada para petugas perpustakaan, kesemuanya memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam operasionalisasinya. Sehingga menjadi sesuatu yang sangat wajar kiranya jika perhatian terhadap perpustakaan di Madrasah Aliyah Konawe Selatan sangat bergantung pada perhatian dan bantuan-bantuan dari pihak luar. Sementara di sisi lain, pendanaan yang lebih besar juga masih sangat dibutuhkan untuk meningkatkan sarana prasarana madrasah lainnya yang juga masih sangat terbatas. Sebagai perbandingan, di Madrasah Aliyah DDI Nurul Qalby Ranomeeto, sesungguhnya memiliki lahan madrasah + 2 Ha, namun pembangunan sekolahnya "hanya" berupa 4 RKB yang tidak semuanya permanen, ditambah 1 kantor yang sekaligus berfungsi sebagai perpustakaan. Artinya, itu hanyalah sepersekian persen dari luas keseluruhan lahan madrasah.

"Standar Nasional Perpustakaan yang diberikan tempo hari itu sudah saya baca pak secara keseluruhan, saya melihat sebuah pedoman pengelolaan perpustakaan yang sangat ideal di sana. Kami sebenarnya agak miris juga ketika melihat kondisi perpustakaan kami yang masih sangat jauh dari standar yang telah ditetapkan itu. Kelihatannya untuk bisa merealisasikan perpustakaan berstandar nasional, juga harus dibutuhkan dana yang cukup besar sebagai perimbangannya, sementara kami di sini sangat terbatas dalam hal pendanaan. Gedung madrasah kami pun masih banyak yang harus dibenahi dan ditambah demi memaksimalkan lahan kami yang luas ini. Belum lagi sarana prasarana lainnya yang juga di sini serba kekurangan (Subhan, Kepala Madrasah Aliyah Nurul Qolby Ranomeeto).

Akan tetapi, meskipun dengan segala keterbatasan yang dimiliki, pihak madrasah tetap memiliki semangat besar dalam memajukan perpustakaannya, walaupun harus dilakukan *step by step*. "Meski begitu kami tetap berusaha mengoptimalkan pelayanan kepada para siswa yang membutuhkan dengan melakukan *update* buku-buku baru setiap semester walaupun hanya 5-10 buku, tergantung dana!" (Tuti Mariani MA Al-Amin Mataiwoi).

Menilik Peran *Stakeholder* untuk Perpustakaan MA di Konsel

Dalam Undang-Undang Nomor 43 tentang Perpustakaan menyebutkan, bahwa Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan. Selain itu, dalam UU ini mengamanahkan kewajiban kepada pemerintah yang terkait dengan pengelolaan perpustakaan untuk: 1) menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat; 2) menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di tanah air; 3) menjamin ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan melalui terjemahan, alih aksara (transliterasi), alih suara ke tulisan (transkripsi), dan alih media (transmedia); 4) menggalakkan promosi gemar membaca dan memanfaatkan perpustakaan; 5) meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan; 6) membina dan mengembangkan kompetensi, profesionalitas pustakawan, dan tenaga teknis perpustakaan.

Stakeholder di sini juga termasuk kepala madrasah sebagai penanggung jawab penuh

satuan pendidikan. Strategi kebijakan kepala madrasah sangat menentukan kualitas pengelolaan perpustakaan. Kebijakan teknis yang dimulai dari pengintegrasian antara tujuan satuan pendidikan (madrasah) dengan tujuan perpustakaan menjadi sesuatu yang paling utama harus digagas. Perangkat pengelola perpustakaan dalam bentuk hierarki struktur organisasi beserta dengan uraian tugas yang jelas (tertulis) juga seharusnya bisa membantu eksistensi dan kualitas pengelolaan perpustakaan agar bisa meminimalisir kesan negatif yang berkembang bahwa tugas sebagai pengelola perpustakaan itu "terpaksa" mereka ambil dalam rangka pemenuhan kuota jam sertifikasi.

Meski dalam Undang-Undang Perpustakaan disebutkan secara jelas, bahwa alokasi penganggaran perpustakaan diperoleh dari sekurang-kurangnya 5% dari total dana madrasah/sekolah. Akan tetapi di Konawe Selatan, terlepas dari kurangnya sosialisasi pelaksanaan undang-undang ini (terbukti dengan ketidaktahuan pengelola terkait keberadaan UU Perpustakaan), pendanaan menjadi salah satu kendala utama dalam proses pengelolaan perpustakaan. Hal ini, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa secara teknis, untuk mengelola perpustakaan madrasah berstandar nasional, maka juga harus berbanding lurus dengan besarnya anggaran yang dibutuhkan. Sementara bagi satuan pendidikan Madrasah Aliyah (khususnya MA swasta di pelosok), strategi pengalokasian anggaran menjadi masalah tersendiri bagi eksistensi madrasah tersebut. Pada beberapa madrasah, dana BOS menjadi senjata ampuh untuk dialokasikan sebagai sumber dana yang cukup punya pengaruh

besar dalam perkembangan Madrasah Aliyah. "Untuk penambahan jumlah koleksi buku-buku perpustakaan kami, sedapat mungkin kami sisipkan dari dana Bantuan Operasional Sekolah" (Syafrial, Kepala Madrasah Aliyah Negeri Konda).

Sementara itu, dalam hal bantuan pemerintah terkait pengembangan perpustakaan madrasah pada satu sisi memiliki nilai positif yang signifikan untuk perpustakaan, misalnya dengan bantuan pengadaan koleksi buku-bukunya (sebagaimana yang beberapa tahun terakhir digalakkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara, Kementerian Agama serta Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan), meskipun sifatnya masih tentatif tergantung programnya, namun di sisi lain bisa menjadi tidak signifikan (antiklimaks) ketika bantuan buku yang diberikan itu tidak sesuai dengan kebutuhan Madrasah Aliyah. "Pernah ada bantuan buku dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara, tapi tidak bisa kami pakai di MA, karena yang dikasi ke kita itu buku pendidikan agama sekolah umum! Padahal kan yang kita butuhkan di sini itu buku pelajaran fiqih, Qur'an hadis, akidah, akhlak, dan lain-lain. Tapi karena namanya dibantu, ya kami terima saja, minimal untuk tambah-tambah pajangan". (Husni Kepala MA Al Amin Mataiwoi). Sehingga koordinasi antar pemerintah/pihak yang memberi bantuan dengan pihak madrasah menjadi penting untuk dilakukan sinkronisasi, agar tidak lagi ada bantuan yang tidak *match* dengan kebutuhan madrasah yang bersangkutan.

Hal lain yang juga menjadi problem perkembangan pengelolaan perpustakaan Madrasah Aliyah adalah kurangnya/tidak adanya program pemerintah yang dikhususkan untuk memberikan pembinaan

dan penguatan kemampuan pengelola perpustakaan dalam bentuk diklat, seminar, workshop, lokakarya atau simposium, dan kegiatan sejenis lainnya. Kalau pun ada, program itu masih belum melibatkan pengelola perpustakaan Madrasah Aliyah di Konawe Selatan. "Selama ini, kami tidak pernah mendengar ada program yang dilakukan oleh Kementerian Agama atau pemerintah kabupaten yang melibatkan kami petugas perpustakaan, kalau pun ada, kami tidak diundang. Padahal bagi kami itu sangat penting untuk membantu mengembangkan potensi dan pengalaman pengelolaan perpustakaan, apalagi kami ini bukan alumni jurusan perpustakaan" (Pengelola perpustakaan MA Nurul Qolby Ranomeeto).

Terlepas dari itu semua, sesungguhnya problem paling utama yang menjadi alasan mengapa pengelolaan perpustakaan di Madrasah Aliyah Konawe Selatan masih dikelola secara sederhana dan otodidak, bahwa pengembangan perpustakaan "bukan" jadi prioritas utama bagi Madrasah Aliyah di Konawe Selatan (atau dalam skala yang lebih luas di MA pelosok), sebab jangankan untuk meningkatkan penyelenggaraan perpustakaan berstandar nasional, eksistensi menyangkut kondisi bangunan serta sarana prasarana lainnya di Madrasah Aliyah di pelosok-pelosok negeri (termasuk di Konawe Selatan) juga berada masih jauh dari penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas (kalau tidak bisa dikatakan sangat memprihatinkan). Dalam hal pembiayaan, pihak madrasah lebih memprioritaskan/lebih mengutamakan dialokasikan untuk peningkatan infrastruktur serta sarana prasarana lainnya yang juga masih terbatas. "Jika pun seandainya, kami

memiliki atau tiba-tiba diberi dana lebih oleh pemerintah atau ada bantuan, maka yang jadi prioritas utama kami di madrasah ini adalah pembangunan RKB serta perangkat pendukung lainnya, karena di sini RKB masih sangat terbatas, sehingga terpaksa kami memberlakukan dua jam masuk, yakni pagi dan siang, karena mereka harus bergantian menggunakan kelasnya. (Subhan, Kepala Madrasah MA DDI Nurul Qalby Ranomeeto).

PENUTUP

Potret pengelolaan perpustakaan MA Konsel mungkin belum berada dalam level memenuhi Standar Nasional Perpustakaan Indonesia, tetapi kekuatan dan keteguhan hati untuk menyelenggarakan perpustakaan dengan maksimal meski dengan berbagai keterbatasan, mencerminkan semangat luar biasa yang justru menjadi ciri khas eksistensi perpustakaan MA di pelosok-pelosok (terbatas tapi fungsional). Pada umumnya, perpustakaan MA di Konawe Selatan masih mengalami berbagai hambatan, sehingga belum bisa berjalan sebagaimana mestinya. Hambatan tersebut berasal dari dua aspek, yaitu: *Pertama*, aspek struktural. Dalam artian, keberadaan perpustakaan madrasah kurang memperoleh perhatian dari pihak manajemen Madrasah. *Kedua*, aspek teknis. Artinya, keberadaan perpustakaan madrasah belum ditunjang aspek-aspek bersifat teknis yang sangat dibutuhkan oleh perpustakaan madrasah, seperti tenaga, dana, dan sarana prasarana. Selain itu, peran *stakeholder* dalam pengembangan perpustakaan dinilai masih perlu peningkatan dari aspek intensifikasi bantuan teknis (sarana prasarana dan koleksi), serta aspek koordinasi berbasis kebutuhan madrasah, termasuk dalam

pencanangan program-program yang lebih berpihak pada kemajuan perpustakaan.

Untuk itu, sebagai rekomendasi penelitian ini, maka diperlukan sosialisasi berbagai regulasi dan/atau pedoman penyelenggaraan perpustakaan secara aktif sampai ke pelosok-pelosok dalam rangka perwujudan perpustakaan MA yang lebih maju. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah pelaksanaan diklat, workshop, simposium, seminar, dan/atau lokakarya terkait

perpustakaan yang melibatkan pengelola perpustakaan MA perlu dilakukan secara merata dan berkesinambungan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada bagian akhir dalam tulisan ini, penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini serta kepada Redaksi Jurnal Penamas Balai Litbang Agama Jakarta yang telah memuat tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bafadal, Ibrahim. 1996. *Pengelolaan Perpustakaan Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- BPS Konawe Selatan. 2013. *Statistik Daerah Kabupaten Konawe Selatan 2013*. Katalog BPS No. 1101002.7405.
- Cresswell, John W. 1994. *Research Design, Qualitative and Quantitative Approaches*. California: Thousand Oaks.
- Djamas, Nurhayati [ed.]. 2005. *Manajemen Madrasah Mandiri*. Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Hosain Khan, Rajjib. T.th. *Academic Library; Heart of the Institution*. Dhaka: Department of Information Science & Library University of Dhaka.
- Kholqillah, Ali Mas'ud. 2010. "Manajemen Perpustakaan Madrasah". *Makalah "Pembinaan Pustakawan Madrasah Aliyah se-Jawa Timur oleh Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur"*, tanggal 19 Mei 2010.
- Milles, M.B. and Huberman, M.A. 1984. *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication.
- Murniaty. 2006. "Manajemen dan Organisasi Perpustakaan Sekolah". *Makalah*, disampaikan dalam Diklat Pustakawan Perpustakaan Sekolah di Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2006.
- Perpustakaan Nasional RI. 2011. *Standar Nasional Perpustakaan (Bidang Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Perguruan Tinggi)*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suherman. 2013. *Perpustakaan sebagai Jantung Sekolah (Referensi Pengelolaan Perpustakaan Sekolah)*. Literate: Bandung.
- UNESCO/IFLA. 2002. *School Library Guidelines*. UNESCO.

UNESCO. 2011. *"United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization"*. Warta Online, 26 Januari 2011.

Utari, Rahmania. 2010. *Teknis Pengelolaan Perpustakaan Sekolah; Pembinaan dan Pengembangan Koleksi – Inventarisasi*. Yogyakarta. Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.

Yusuf, Pawit M. dkk. 2007. *Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah*. Jakarta: Prenada Media.

Website:

Abdurahman. 2014. "Revitalisasi Pengelolaan Perpustakaan Madrasah." Diakses 28 April, 2014.<http://projectabdur.wordpress.com/2013/06/14/revitalisasi-pengelolaan-perpustakaan-madrasah/>.

Hanna, Rahmat. 2011. "Mengembalikan Peran dan Fungsi Perpustakaan Madrasah." Diakses 15 Januari, 2014. <http://sulut.kemenag.go.id/file/file/BimasIslam/qnev1368628208.pdf>.

Perundang-Undangan:

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

